

SKRIPSI

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA POLRES
KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi)**



**Oleh :
RENITA
190412017**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2023**

SKRIPSI

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA POLRES KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi)

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :
RENITA

190412017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM Kuantan Singingi
TELUK Kuantan
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

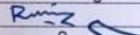
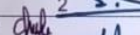
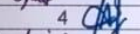


ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA POLRES KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi)

disusun dan diajukan oleh :

RENITA
190412017

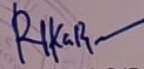
Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal **27 Juni 2023**
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rina Andriani, SE.,M.Si	Ketua	1 
2	M. Irwan, SE.,MM	Sekretaris	2 
3	Dessy Kumala Dewi, SE.,M.Ak	Anggota	3 
4	Diskhamarzeweny, SE.,MM	Anggota	4 
5	Zul Ammar, SE.,ME	Anggota	5 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi


Rina Andriani, SE.,M.Si
NIDN. 1603058501

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA POLRES KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi)

disusun dan diajukan oleh :

RENITA
190412017

telah diperiksa dan disetujui Oleh Komisi Banding

Teluk Kuantan, 22 Juni 2023

Pembimbing I

Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak
NIDN. 1006068503

Pembimbing II

M. Irwan, S.E., M.M
NIDN. 1012058301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, S.E., M.Si
NIDN. 1003058501

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Renita
NPM : 190412017
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2009, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 22 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



RENITA
NPM. 190412017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang karena nikmat-Nya lah telah sempurna segala kebaikan Sholawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin para nabi dan para mujahid yang berjihat fisabilillah, baginda kita nabi Muhammad SAW tiada yang pantas terucap selain syukur Alhamdulillah Robbilalamin akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Polres Kuantan Singingi (Studi kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi)”. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai masalah dan sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri melainkan berkat bantuan, sokongan dan bimbingan yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu **Rina Adriani, S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **M. Irwan, SE., ME** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Bapak **AKP Hajjarul Asawadiman** selaku Kepala Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi yang telah memberikan izin untuk penulis meneliti dan memberikan data yang dibutuhkan penulis serta meluangkan waktu untuk di wawancarai.
8. Teristimewa ucapan terimakasih kepada orang tua tercinta, ayahanda tercinta **Herianto Manulang** dan ibunda tercinta **Sumiati** atas semua bantuan baik moril materil dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai sekarang, serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudari penulis **Refal Rianto Manulang. ST** terimakasih karena telah banyak mensupport dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman terbaik penulis, **Bencana Squad (Lia Hari Kurniawati, Nur Safrianis, Priti Anggun Pramesti, Indri Oktavia Ningsi)** yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2019 dan rekan-rekan sepejuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas kebersamaan dan kerjasamanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamualikum wr. wb

Teluk Kuantan , 22 Juni 2023

Penulis

Renita
NPM. 190412017

ABSTRAK

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA POLRERS KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS SATUAN SAMAPTA POLRES KUANTAN SINGINGI)

Renita
Dessy Kumala Dewi
M.Irwan

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah realisasi anggaran dalam menilai efisiensi dan efektivitas kinerja pada Polres Kuantan Singingi dengan studi kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi sedangkan sampel yang di gunakan Realisasi Anggaran dari tahun 2020-2022 yang ada di Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara observasi dan laporan keuangan secara langsung. Analisis data menggunakan analisis data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui realisasi anggaran dan menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Polres Kuantan Singingi dengan studi kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Realisasi Anggaran Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Polres Kuantan Singingi dengan studi kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi dikatakan Baik dikarenakan data yang di olah secara olah sekunder memberikan hasil yang baik pula.

Kata Kunci : Anggaran, Kinerja, Efektivitas, dan Efisien.

ABSTRACT

ANALYSIS OF BUDGET REALIZATION TO ASSESS THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE KUANTAN SINGI POLRERS PERFORMANCE (CASE STUDYSAMAPTA UNIT POLRES KUANTAN SINGINGI)

Renita
Dessy Kumala Dewi
M. Irwan

This research is to find out how the realization of the budget is in assessing the efficiency and effectiveness of performance at the Kuantan Singingin Police Station with a case study of the Kuantan Singingin Police Station Samapta. The type of research used in this research is quantitative descriptive research. use the Budget Realization from 2020-2022 in the Samapta Unit of the Kuanan Singingin Police. The data used in this study is primary data collected through direct observation interviews and financial reports. Data analysis used secondary data analysis. Data analysis techniques using effectiveness analysis and efficiency analysis. The intent and purpose of this research is to find out the realization of the budget and assess the effectiveness and efficiency of the performance of the Singingin Police in the case of the Samapta Unit of the Singingin Police.

The results of this study indicate that Budget Realization Analysis Performance Effectiveness and Efficiency of the Singingin Police Unit with a case study The Samapta Police Unit of the Singingin Police is said to be good because of the data which is processed by secondary processing gives good results as well.

Keywords : Budget, Peformance, Effectiveness, and Efficiency.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Anggaran Sektor Publik	10
2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	10
2.1.3 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik	12

2.1.4	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	15
2.1.5	Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	17
2.1.6	Efektivitas	18
2.1.7	Efisiensi	19
2.1.8	Pengukuran Kinerja	20
2.1.9	Tujuan Penilaian Kinerja	22
2.1.10	Faktor yang Mempengaruhi	23
2.1.11	Indikator Kinerja	24
2.2	Penelitian Terdahulu	25
2.3	Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3	Populasi dan Sampel	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data	31
3.5	Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	36
4.1.1	Sejarah Polres Kuantan Singingi	37
4.1.2	Visi dan Misi Polres Kuantan Singingi	37
4.1.3	Bidang Kegiatan Yang Terdapat di Polres Kuantan Singingi	37
4.1.4	Struktur Organisasi Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi	50
4.1.5	Tugas dan Fungsi	53
4.2	Hasil Penelitian	59
4.2.1	Analisis Efektivitas	59
4.2.2	Analisis Efisiensi	61
4.3	Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN		71

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1.1 Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Polres Kuantan Singingi dengan Studi Kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi Tahun 2020.....	6
1.2 Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Polres Kuantan Singingi 1.3 dengan Studi Kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi Tahun 2021	6
1.4 Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Polres Kuantan Singing dengan Studi Kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi Tahun 2022.....	7
2.1 Hasil Review Penelitian Terdahulu	25
3.1 Persentase Penilaian Efektivitas	34
3.2 Persentase Penilaian Efisiensi	35
4.1 Jam Buka Operasional Polres Kuantan Singingi	36
4.2 Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi Tahun 2020-2022	60
4.3 Perkembangan Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi Tahun 2020-2022	62
4.4 Data Persentase Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
4.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Samapta Polres Kuantan Singing.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
1. Draf Wawancara	71
2. Foto Kegiatan Wawancara	76
3. Biodata.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur, realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah “*operasional management*”. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik atau penyedia layanan, mempunyai fungsi operasional. Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi (Bastian, 2017:231)

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu seseorang kinerja publik dalam menilai sebuah pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial atau non finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja suatu instansi. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu suatu instansi berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan (Nina Rahma Melina Djamil 2019).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur moneter maupun non moneter. Dengan demikian pengukuran sektor publik merupakan suatu sistem penilaian bagi para manajer dalam pencapaian sebuah strategi.

Tingkat keberhasilan penganggaran ini biasanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja apabila terjadi defisit atau surplus anggaran berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dengan adanya barometer keberhasilan anggaran instansi seperti ini maka terbentuklah pemikiran bahwa penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan harus (100%) agar tidak terjadi surplus atau defisit tanpa memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Memberikan tingkat efektivitas dan efisiensi dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh instansi tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja pada instansi yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa dalam menghasilkan output dan outcome terhadap karyawan. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan instansi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Menurut Beni (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Jika suatu organisasi ingin

membangun rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi, sebuah unit kecelakaan dan darurat, serta unit pasien luar dan semua target tersebut tercapai, maka organisme kerja organisasi itu dianggap efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur yang terbangun, organisasi tersebut dianggap tidak efektif. Kerena itu tujuan-tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam rangka mencapai tujuan itu, organisasi sektor publik seringkali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi, apabila efisiensi biaya bukan merupakan salah satu tujuan dari indikator hasil.

Untuk efisiensi sendiri pada instansi untuk mengukur tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat (Sedarmayanti, 2014:22).

Penilaian atas kinerja suatu instansi sektor publik saat ini masih dilakukan pada tiga konsep dasar, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Efisiensi merupakan hal yang penting diantara ketiga hal tersebut, dengan rumusan rasio sebagai berikut.

$$\frac{\text{OUTPUT}}{\text{INPUT}}$$

Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan proses keuangan dan kinerja organisasi. Namun, berbagai program pada dua organisasi yang berkecimpungan dalam industri yang sama dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila hasil rasionya lebih besar dari satu dibandingkan hasil rasio program yang sama di organisasi lainnya, program tersebut lebih efisien (Bastian, 2016:61).

Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan lama suatu periode. Realisasi anggaran tersebut harus dinilai efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahui penyerapan anggaran suatu dinas atau instansi pemerintah daerah. Selain itu, dengan tingkat efisiensi dan efektivitas kita dapat melihat apakah penyerapan anggaran sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efektif dan efisien harus dilakukan secara maksimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi anggarannya, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? Kalau pengelolaan belum efektif dan efisien ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pengelolaannya belum efektif dan efisien maka perlu dorongan atau digenjut lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik.

Julian (2015) mengemukakan keterkaitan antara anggaran dengan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dilakukan efektif dan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur analisis kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varian anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Selain itu LRA juga sangat diperlukan bagi pengguna laporan keuangan instansi untuk membantu mengawasi kinerja pada suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan. Laporan Realisasi Anggaran merupakan sebuah laporan dimana memuat tentang informasi realisasi pendapatan, belanja, dan biaya dari

suatu entitas yang akan dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Adanya Laporan ini dapat diketahui bahwa informasi tentang kondisi ekonomi yang diterima untuk membiayai program pemerintah daerah serta akibat atas suatu kondisi ekonomi tersebut. Permasalahan jika Laporan Realisasi Anggaran ini tidak dipublikasikan, maka pemerintah daerah tidak bisa melakukan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan pada pengguna laporan keuangan atau anggaran sudah efektif dan efisien dalam melakukan realisasi suatu anggaran selama satu tahun.

Efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam melakukan penilaian antara pengeluaran yang dihasilkan terhadap penerimaan yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, efektivitas dan efisiensi adalah isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi atau organisasi pemerintah yang ingin berusaha agar mendapatkan kriteria efektif dan efisien dalam anggaran tersebut. Secara umum efektivitas adalah pencapaian tujuan dengan batas waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan efisiensi adalah suatu pencapaian target dengan menggunakan biaya.

Organisasi sektor publik penganggaran merupakan tujuan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan.

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2018).

Tabel 1.1
Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Polres Kuantan Singingi
dengan studi kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi
Tahun 2020 (dalam rupiah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2020	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Program Modernisasi Almatsus (Alat Material Khusus) dan Sarana Prasarana Polri	230.000.000	230.000.000
2	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	540.512.000	540.512.000

Sumber : Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi

Tabel 1.2
Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Polres Kuantan Singingi
dengan studi kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi
Tahun 2021 (dalam rupiah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2021	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Program Modernisasi Almatsus (Alat Material Khusus) dan Sarana Prasarana Polri	170.840.000	170.840.000
2	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	614.208.000	614.208.000

Sumber : Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi

Tabel 1.3
Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Polres Kuantan Singingi
dengan studi kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi
Tahun 2022 (dalam rupiah)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2022	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Program Modernisasi Almatsus (Alat Material Khusus) dan Sarana Prasarana Polri	194.140.000	194.140.000
2	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	587.568.000	587.568.000

Sumber : Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi

Menurut Laporan Kinerja Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi pada tahun 2020-2022 realisasi pengeluaran keuangan untuk masing-masing program/kegiatan telah terserap penuh. Pada tahun 2020 program/kegiatan terserap secara penuh yang dengan total realisasinya sebesar Rp.770.512.000. Pada tahun 2021 anggaran untuk program/kegiatan terserap secara penuh dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.785.048.000, begitu juga dengan anggaran pada tahun 2022 untuk program/kegiatan juga terserap secara penuh dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.781.708.000.

Dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.536.000 dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.340.000. itu artinya realisasi anggaran mengalami kenaikan dan penurunan dan apakah program yang dijalankan pada tahun 2020-2022 efektif dan efisien?.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan realisasi anggaran di Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi maka perlu dilakukan analisis terhadap laporan anggaran dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk

penelitian dengan judul **Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Polres kuantan Singingi (Studi Kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana realisasi anggaran untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja Polres Kuantan Singingi (studi kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui realisasi anggaran dalam menilai efektifitas dan efisiensi kinerja pada Polres Kuantan Singingi (studi kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengukuran kinerja pada Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi menggunakan teori Mahsun, serta diharapkan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Untuk memberikan pengalaman, serta menambah ilmu pengetahuan, pemahaman dan wawasan mengenai realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Polres Kuantan Singingi (studi kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi).

2. Bagi instansi

Yaitu sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi mengenai kebijakan dalam mengambil keputusan dan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai rujukan informasi bagi peneliti selanjutnya sehingga memberi referensi tentang metode pendekatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Anggaran Sektor Publik

Pengertian anggaran sektor publik menurut Bastian (2013:69) yaitu anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Menurut Mahmudi (2016:59) pengertian anggaran sektor publik adalah organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan.

2.1.2. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Halim dan Kusufi (2016:48) mengidentifikasi bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

7. Anggaran sebagai alat motivasi
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

Uraian mengenai kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai alat motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya nonpemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

2.1.3. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama setelah adanya gerakan reformasi sektor publik di berbagai negara. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan

penyusunan anggaran sektor publik. Menurut Halim dan Kusufi (2016:52) dalam menyusun anggaran terdapat dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisional yaitu:

- a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism.
- b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.
- c. Cenderung sentralistis.
- d. Bersifat spesifikasi.
- e. Tahunan.
- f. Menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto.

2. Pendekatan New Publik

Management New Publik management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Paradigma new public management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, yaitu:

- a. Anggaran Kinerja (*Performance Budgeting*) Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Anggaran program (Program Budgeting) metode ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan dari aktivitas pemerintah daripada input untuk menghasilkan barang dan jasa

pemerintah.

- c. Anggaran Berbasis Nol (*Zero Based Budgeting-ZBB*) Penyusunan anggaran ini dapat mengatasi kelemahan pendekatan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-based), tidak berdasarkan pada tahun lalu tapi berdasarkan kebutuhan saat ini.
- d. *Planning, Programming and Budgeting System* (PPBS) PPBS merupakan suatu anggaran di mana pengeluaran secara primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan kinerja. PPBS merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran.

Selain itu, Mahmudi (2016:69) mengemukakan beberapa jenis anggaran sektor publik yaitu:

1. *Line Item Budget*
2. *Incremental Budget*
3. *Planning, Programming, Budgeting System* (PPBS)
4. *Zero Based Budget* (ZBB)
5. *Performance Budget*

Penjelasan dari jenis-jenis anggaran sektor publik di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Line Item Budget*

Sistem anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input atau sumber daya yang digunakan, tetapi tidak mengukur efisiensi dan efektivitas program karena tidak dilakukan pengkaitan antara input dengan output.

2. *Incremental Budget*

Incremental budget merupakan sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar anggaran tahun depan. Dalam praktiknya incremental budget seringkali diikuti dengan sistem line item budget.

3. *Planning, Programming Budgeting System (PPBS)*

PPBS merupakan sistem penganggaran yang penyusunan anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang dituangkan dalam renstra unit kerja. Renstra unit kerja kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang berisi program kerja beserta target kinerjanya.

4. *Zero Based Budget (ZBB)*

Zero Based Budget merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol. Performance Budget Performance Budget merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

2.1.4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang Realisasi dan Anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. (Harry Al Makka, 2015).

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan

APBD. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ramlah, 2013;207).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, ransfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan daam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Periode pelaporan laporan realisasi anggaran disajikan sekkurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan sutau entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebuah panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi (Eduard dkk, 2015;854).

2.1.5. Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
 - a) Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan terhadap penggunaan anggaran.

b) Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah direncanakan.

2. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

a) Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam hal ini para pemegang saham maupun investor dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b) Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai perusahaan dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

2.1.6. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan. Sedangkan, secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan menurut (Hasan Alwi, 2015:204).

Efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, kelengkapan yang lainya. Mengubah perilaku kearah yang positif dan lebih baik

sesuai dengan potensi dan perbedaan agar bisa menuju pembelajaran yang efektif. Efektif yang dimaksud pencapaian suatu tujuan yang dilakukannya dengan tindakan-tindakan untuk mencapai hal-hal tersebut. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa dengan guru dalam situasi edukatif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas merupakan suatu ukuran dari produktivitas (hasil) yang mengarah terhadap tercapainya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas ialah tolak ukur yang merujuk pada sejauh mana pencapaian yang telah dicapai menurut (Afifatu Rohmawati, 2015:18).

Rumus efektifitas menurut Mahsun (2013:187-188) sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan instansi dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan.

Menurut Mahsun (2013:187) kriteria efektifitas adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efektif berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif.

2.1.7. Efisiensi

Setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran, diperlukan adanya efisiensi dalam melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya sasaran tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan tepat.

Penulis disini akan mengutip pendapat-pendapat dari para ahli tentang efisiensi. Dalam kamus besar pengertian efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya).

Menurut Sedarmayanti (2014:22) efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Rumus efisiensi menurut Mahsun (2013:187) sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisien} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun (2013:187) kriteria efisiensi adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti efisien.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efisiensi berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti tidak efisien.

2.1.8. Pengukuran Kinerja

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau targettarget tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mahsun, 2015: 25).

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2013: 25).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut (Sony Yuwono dkk, 2020:29) bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih

konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.

- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut. Dari beberapa pengertian dan penjabaran tentang pentingnya pengukuran kinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan organisasi di masa yang akan datang.

2.2.9. Tujuan penilaian Kinerja

Menurut Rivai dan Sagala (2013:547) tujuan perusahaan dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut

1. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan Karyawan membutuhkan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai suatu pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan prestasi kerja Salah satu tujuan memberikan penilaian kinerja yaitu untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, karena semakin baik nilai prestasi yang dicapai karyawan akan mempertahankan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi dalam hal bekerja.
3. Memberikan kesempatan kerja yang adil Penilaian kinerja akan berdampak seorang karyawan akan merasa memiliki kesempatan yang adil dalam hal mengerjakan pekerjaannya.

2.2.10. Faktor yang mempengaruhi Kinerja

Sutrisno (2016:151) mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja yaitu faktor individu dan faktor lingkungan, faktor-faktor individu yang dimaksud adalah:

1. Faktor Individu

- a) Usaha (effort) yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas.
- b) Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas.
- c) Role/ Task Perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

2. Faktor Lingkungan

- a) Kondisi fisik
- b) Peralatan
- c) Waktu
- d) Material
- e) Pendidikan
- f) Supervisi)
- g) Desain organisasi
- h) Pelatihan
- i) Keberuntungan

2.2.11. Indikator Kinerja

Karyawan Menurut Robbins (2016:260) indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah:

- (1) Kualitas Kerja
- (2) Kuantitas
- (3) Ketepatan Waktu
- (4) Efektifitas
- (5) Kemandirian

Kualitas kerja karyawan dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan (Robbins, 2016: 260).

Kualitas kerja dapat digambarkan dari tingkat baik buruknya hasil kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan juga kemampuan dan keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugas yang diberikan padanya. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan (Robbin, 2016: 260).

Kuantitas yaitu ukuran jumlah hasil kerja unit maupun jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan oleh karyawan sehingga kinerja karyawan dapat diukur melalui jumlah (unit/siklus) tersebut. misalnya karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dari batas waktu yang ditentukan perusahaan. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain (Robbins, 2016: 261).

Kinerja Karyawan juga dapat diukur dari ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain yang merupakan bagian dari tugas karyawan tersebut. Efektifitas disini merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi dan bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya (Robbins, 2016: 261).

Bahwa dalam pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya manusia itu sendiri maupun sumber daya yang berupa teknologi, modal, informasi dan bahan baku yang ada di organisasi dapat digunakan semaksimal mungkin oleh karyawan. Kemandirian merupakan tingkat seseorang yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa menerima bantuan, bimbingan dari atau pengawas (Robbins, 2016: 261).

Kinerja karyawa itu meningkat atau menurun dapat dilihat dari kualitas kerja karyawan, kuantitas kerja karyawan, ketepatan waktu karyawan dalam bekerja disegala aspek, efektifitas dan kemandirian karyawan dalam bekerja. Artinya karyawan yang mandiri, yaitu karyawan ketika melakukan pekerjaannya tidak perlu diawasi dan bisa menjalankan sendiri fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan dan penentuan sampel berbeda maka dapat banyak hal yang sama,

sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian:

Tabel 2.1
Hasil Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sumenge (2013)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencana Pembangunan Daerah Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2011. Pelaksanaan anggaran belanja Bpaeda Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2008-2012 secara keseluruhan sudah afesien.
2	Lomboan (2014)	Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan ada hasil negative yang menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran atau dikatakan selisih wajar (<i>favourable variance</i>)
3	Dwi NovitSari (2014)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja	Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2011-2015 secara keseluruhan sudah dikelola secara baik.
4	Tamasoleng (2015)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengamatan dan wawancara

		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dengan penerapan berbasis kinerja belum dilaksanakan.
5	Kiky Muryanti (2017)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015
6	Ade Khusnul Khotimah (2018)	Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah kabupaten kebumen tahun anggaran 2014- 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2014-2017 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki tingkat presentase efektivitas rata-rata diatas 100%, sedangkan tingkat efisiensi realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2014 dapat dikatakan kurang efisien, kemudian tahun anggaran 2015-2017 dapat dikatakan cukup efisien
7	Vera Sri Endah Cicilia (2018)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten	Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang

		Minahasa Utara	makin efisien.
8	Verrys Andranto (2019)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kota Kediri (Studi Pada Bppkad Kota Kediri Tahun 2014-2017)	Perkembangan tingkat efesiensi pengelolaan keuangan di pemerintah kota Kediri selama tahun anggaran 2014-2017 dapat dikatakan belum efisien.
9	Alful Laila Rosyidah Noor Shofwah (2019)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Pada Kantor Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Periode 2013- 2017	Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di kelurahan kutoanyar kecamatan tulungagung kabupaten tulungagung selama tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan efektif
10	Heldawati (2021)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu	Perkembangan tingkat efektifitas pengelolaaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu selama tahun anggaran 2014-2018 dapat dikatan efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata diats 100%. Penegembangan tingkat efesiensi penelolan keuangan daerah di Kabupaten Luwu selama tahun anggaran 2014-2018 dapat dikatakan cukup efesien dalam mengelola anggaran keuangn daerah dengan mewujudkan adanya

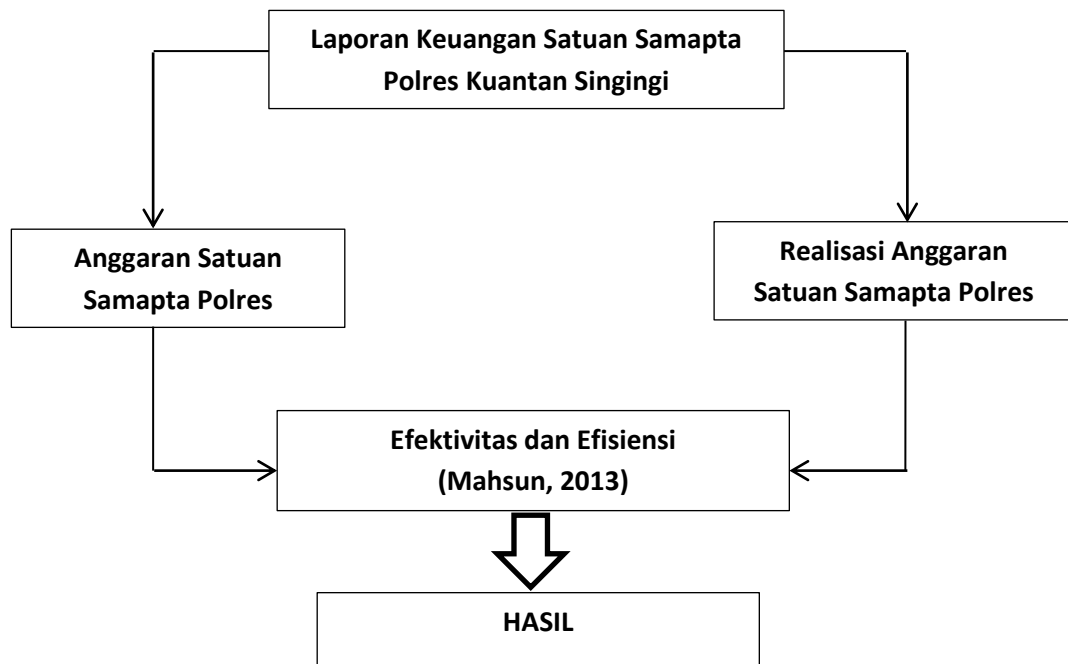
			penurunan tingkat efesien yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja daerah oleh pemerintah daerah.
--	--	--	---

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu 2023

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir sesuai berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori. Kerangka berpikir merupakan bagan yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan penelitian berdasarkan pemaparan studi teoritik dan studi penelitian terdahulu. Gabungan antara teori dan penelitian terdahulu menghasilkan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang dihasilkan yaitu variabel realisasi anggaran dan variabel efektivitas dan efisiensi suatu instansi tahunnya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Heldawati, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama tiga tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yang diperoleh dari Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi berupa laporan tahunan yang bersangkutan. Dalam hal ini dipaparkan realisasi anggaran dan kondisi keuangan Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi, sedangkan secara kuantitatif dihitung perkembangan efektivitas dan efisiensi penegelolaan keuangan Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi. Unit analisis pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi tahun 2020 samapi dengan anggaran tahun 2022.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemasukkan, Belanja Operasi, Belanja Pegawai, Belanja tak terduga dan lain-lain. Pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sebagai institusi melalui data seri waktu, pengumpulan data sekunder diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran dari Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai Mei 2023.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Silaen (2018: 87) "Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti. Populasi juga disebut universum (universe) yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup atau benda mati". Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi 2020-2022

2. Sampel

Menurut Silaen (2018: 87) "Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamatai karakteristiknya". Sampel dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran dari tahun 2020-2022 yang ada di Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini baik melalui sumber primer maupun sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

2. Penelitian Lapangan

Adapun alat-alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian lapangan adalah:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang ada. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan realisasi anggaran yang ada di Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi. Dengan begitu, peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian dan pendataan efektifitas dan efisiensi kerja.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung dengan pegawai Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi.

c) Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Dan data Sekunder Dalam hal ini Data Primer didapatkan dari kegiatan observasi dan dokumentasi secara langsung ditempat penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran, dimana, penulis memperoleh data langsung pada Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi.

3.5. Teknik Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2018:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*). Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan.

Rumus efektivitas menurut Mahsun (2013:187-188) sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan instansi dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Persentase Penilaian Efektifitas

Kriteria	Persentase Nilai Kinerja
Tidak efektif	$X < 100\%$
Efektif berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

Sumber. Mahsun (2013)

2. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi Sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Yulianti, 2015). Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, unit kerja A lebih efisien dibandingkan unit kerja.

Rumus efisiensi menurut Mahsun (2013:187) sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisien} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efisien dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Penilaian Efisien

Kriteria	Persentase Nilai Kinerja
Efisien	$X < 100\%$
Efisien berimbang	$X = 100\%$
Tidak Efisien	$X > 100\%$

Sumber. Mahsun (2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Polres Kuantan Singingi

Polres Kabupaten Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran Polres Indragiri Hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Polres Kabupaten Kuantan Singingi berlokasi di Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi status gedung pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupten Kuantan Singingi. Pada tahun 2008 bangunan mako Polres Kuantan Singing didirikan dengan menggunakan DIPA polri, lokasi bangunan mako Polres Kuantan Singing terletak di jalan KM2 Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas tanah sebesar 5.000 M².

Polres Kuantan Singingi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat memiliki jam buka operasional seperti dibawah ini :

Tabel 4.1

Jam Buka Operasional Polres Kuantan Singingi

Hari	Jam
Senin – Rabu	07.30 WIB – 16.00 WIB
Kamis – Jum'at	07.30 WIB – 16.30 WIB

4.1.2. Visi dan Misi Polres Kuantan Singingi

1. Visi

- a. Visi Polda Riau

Terwujudnya Riau aman dan tertib.

- b. Visi Polres Kuantan Singingi

Terwujudnya Kuantan Singingi yang aman dan tertib.

2. Misi

- a. Misi Polda Riau adalah Melindungi, melayani dan mengayomi di Provinsi Riau.
- b. Misi Polres Kuantan Singingi adalah Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat Polres Kuantan Singingi.

4.1.3. Bidang Kegiatan Yang Terdapat di Polres Kuantan Singingi

Polres Kuantan Singingi memberikan pelayanan terhadap masyarakat daerah kawasan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun beberapa bidang kegiatan yang terdapat di Polres Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Bagian Operasional Polres Kuantan Singingi

Bagian Operasional Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf pada Polres yang bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam mendukung komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional Polres termasuk penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polres bersifat terpadu serta pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bagian Operasional melaksanakan:

- a. Membina data/informasi yang berkenaan dengan melaksanakan tugas operasional, termasuk menerima dan menyalurkan kepada satuan-satuan dalam lingkungan Polres dan kesatuan atasnya.
- b. Memantau secara terus-menerus tentang situasi keamanan ketertiban masyarakat dan wilayahnya.
- c. Mendukung pelaksanaan komando dan pelaksanaan operasional.
- d. Dalam situasi krisis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.
- e. Sebagai badan staf operasional Polres, menyelenggarakan segala pekerjaan/kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khususnya atas penyelenggaraan operasi-operasi khusus yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara.

Mengendalikan pelaksanaan pemberian pertolongan/perlindungan/bantuan kepolisian dan tindakan ditempat kejadian.

2. Bagian Perencanaan (Bagren) Polres Kuantan Singingi

Bagian Ren adalah unsur pelaksana yang bertugas menyusun rencana kerja (renja), mengendalikan program dan anggaran, serta mengalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaan, termasuk merencanakan pengembangan satuan wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Bagian Ren:

- a. Menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres antara lain rencana strategis (Renstra), rancangan renja dan renja.

- b. Menyusun kebutuhan rencana anggaran polres dalam bentuk rencana anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, kerangka acuan kerja (KAK) atau *term of reference (TOR)* dan rincian anggaran biaya (RAB).
- c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat polres.
- d. Pemantauan penyusunan laporan realisasi (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

3. Bagian Sumber Daya (Sumda) Polres Kuantan Singingi

Bagian Sumda Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan administrasi personel sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan penerapan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bagian Sumda menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan Administrasi Personel
 1. Pembinaan karir personel Polri antara lain usulan kenaikan pangkat (UKP), kenaikan gaji berkala (KGB), mutasi perpangkatan dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan polres.
 2. Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moral dan materil, pengusulan tanda

kehormatan.

3. Pembinaan psikologi antara lain kesehatan jiwa dan psikologi para pemegang senjata api.
 4. Pelatihan fungsi antara lain fungsi teknis kepolisian, perpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung.
 5. Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya.
- b. Pembinaan Administrasi Sarana dan Prasarana (Sarpras), antara lain :
1. Menginventaris, merawat dan menyalurkan pembekalan umum, peralatan khusus, senjata api dan angkutan.
 2. Melaksanakan sistem manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN).
 3. Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon.
- c. Pelayanan Bantuan Penerapan Hukum, antara lain :
1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarga dan masyarakat.
 2. Memberikan pendapat dan saran hukum.
 3. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat.
 4. Menganalisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.
 5. Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah.

4. Sistem Informasi Pengawas (Siwas) Polres Kuantan Singingi

Siwas Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang bertugas monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Siwas:

1. Monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.
2. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja.
3. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa.
4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

5. Divisi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Kuantan Singingi

Sipropam adalah unsur pelaksana staf pada Polres Kuantan Singingi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota polri/PNS polri, melaksanakan sidang disiplin/kode etik profesi polri, serta rehabilitasi personel.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, sipropam:

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
2. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres.
3. Pelaksanaan sidang disiplin/kode etik profesi Polri serta pemuliaan profesi personel.
4. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin/kode etik profesi Polri.
5. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin/kode etik profesi.

6. Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Kuantan Singingi

Sikeu adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sikeu:

1. Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi.
2. Pembayaran gaji personel Polri.

3. Penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) serta pertanggung jawaban keuangan.

7. Tupokseksi Umum (Sium) Polres Kuantan Singingi

Sium adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan polres.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sium:

1. Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan polres.
2. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam di lingkungan polres.

8. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kuantan Singingi

SPKT polres kuantan singingi yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, SPKT:

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP),

surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).

2. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
3. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksmile dan jejaring sosial (internet).
4. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolres melalui Kabag Ops.

9. Satuan Intelkam Polres Kuantan Singingi

Satuan intelkam adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan fungsi intelijen dan pengamanan kepolisian (Intelpampol) di wilayah polres termasuk memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan fungsi ditingkat polres juga bertugas menyelenggarakan dan membina.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sat Intelkam:

1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen dilingkungan polres.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early*

warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengemban fungsi intelijen.

3. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah daerah.
4. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan polres.
5. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
6. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pecan raya dan pertunjukan/permainan ketangkasan.
7. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, *outward bound* dan kegiatan politik.
8. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

10. Satuan Reskrim Polres Kuantan Singingi

Satuan reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Reskrim:

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satreskrim.
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polres.

11. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kuantan Singingi

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Satresnarkoba:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya.
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satresnarkoba polres.
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satresnarkoba.

12. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Kuantan Singingi

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan/tokoh masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Satbinmas:

1. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerja sama polres masyarakat.

3. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
4. Pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan polsus serta satuan pengamanan (satpam).
5. Pemberdayaan kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan masyarakat.

13. Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polres Kuantan Singingi

Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan tindak pidana ringan serta pemberdayaan untuk pengamanan swakarsa.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sat Sabhara:

1. Menyelenggarakan fungsi sabhara, yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli, pengaturan dan tindakan pertama ditempat kejadian (TPTKP).
2. Membantu penyelenggaraan operasi khusus kepolisian yang diperintahkan.

14. Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh wilayah Polres Kuantan Singingi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Satuan Lalu Lintas:

1. Menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Meliputi:
 - a. Penegakan hukum lalu lintas.
 - b. Pendidikan masyarakat lalu lintas.
 - c. Rekayasa (*Engineering*).
 - d. Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
2. Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

15. Seksi Teknologi Informasi Polisi (Sitipol) Polres Kuantan Singingi

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sitipol:

1. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
2. Penyelenggaraan system informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal.
3. Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan polres.

16. Polsek dalam Jajaran Polres Kuantan Singingi

Polsek dalam jajaran polres kuantan singingi berjumlah 10 polsek yang bertugas menyelenggarakan fungsi utama kepolisian sehari-hari dalam rangka mewujudkan kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam wilayah hukum yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi yang bersangkutan dengan Polsek:

1. Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditangani.
2. Melaksanakan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

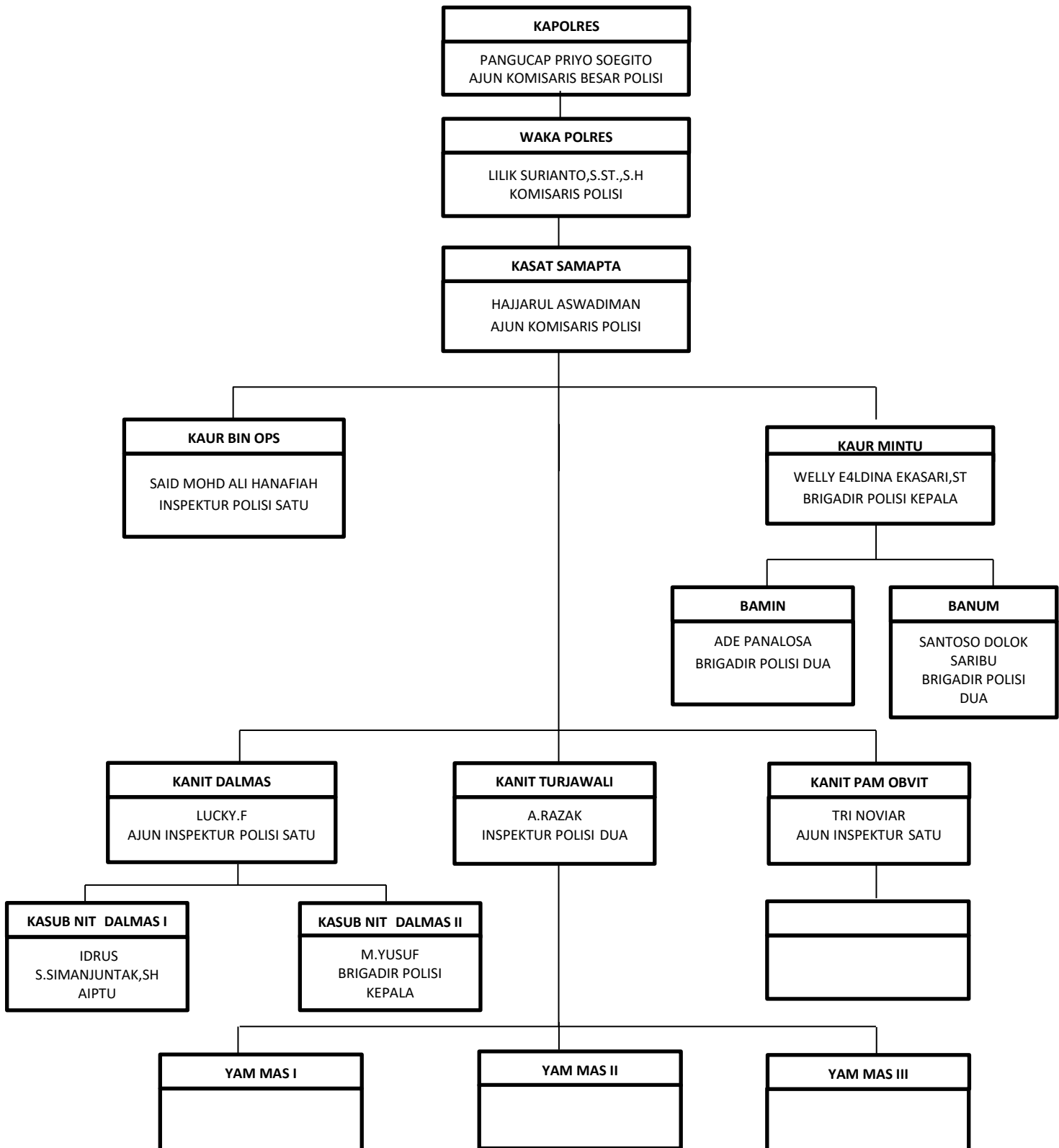
4.1.4. Struktur Organisasi Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi

Susunan Organisasi Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi terdiri dari:

- a. Kapolres
- b. Waka Polres
- c. Kasat Samapta (Kepala Satuan Samapta)
- d. Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan)
 1. Bamin (Bintara Administrasi)
 2. Banum (Bintara Urusan Umum)
- e. Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Kriminal)
- f. Kanit Pam Obvit (Kepala Unit Pengaman Objek Vital)

- g. Kanit Turjawali (Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli)
 - 1. Yan Mas I (Pelayanan Markas I)
 - 2. Yan Mas II (Pelayanan Markas II)
 - 3. Yan Mas III (Pelayanan Markas III)
- h. Kanit Dalmas (Kepala Pengendali Masa)
 - 1. Kasub Nit Dalmas I
 - 2. Kasub Nit Dalmas II

Gambar 4.1
BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN SAMAPTA
POLRES KUANTAN SINGINGI



Sumber : Polres Kuantan Singingi, 2023

4.1.5. Tugas dan Fungsi Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi

1. Kapolres
 - a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Waka Polres
 - a. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.
 - b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan.
 - c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.
3. Kasat Samapta (Kepala Satuan Samapta)
 - a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan Polres teluk bintuni mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - b. Menyelenggarakan/membina Fungsi Kesamaptaan Kepolisian/tugas umum dan pam obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di TKP dan penanganan Tindak Pidanan Ringan (Tipiring), pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk Pam Swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- c. Berdasarkan Program kerja dan petunjuk teknis pembina Sabhara, menetapkan rencana dan program kerja Sat Sabhara Polres Teluk Bintuni serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- d. Memimpin dan membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Polres sehingga terjamin pelaksanaan fungsi Sabhara.
- e. Mengadakan koordinasi dan membantu mengawasi serta memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan fungsi teknis Sabhara oleh badan-badan lain di lingkungan Polres Teluk Kuantan sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawab.
- f. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi pada tingkat Polsek.
- g. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi Sabhara pada Polsek maupun Satuan.
- h. Mengadakan koordinasi dengan para Kapolsek maupun Kasat dan setiap pelaksanaan kegiatan operasional yang melibatkan fungsi Sabhara.
- i. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk pullajianta / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsi Sabhara.
- j. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping yang memerlukan bantuan Anggota Sat Sabhara.

- k. Memberikan bantuan Pengamanan dalam pelaksanaan sidang di PN.
 - l. Memberikan bantuan pengawalan tersangka untuk di hadirkan dalam persidangan oleh Kejaksaan Negeri.
4. Kaur Mintu (Kelapa Urusan Administrasi dan Katatausahaan)
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Satuan Samapta
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Satuan Samapta.
 - c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Satuan Samapta.
 - d. Menyusun produk perencanaan dan anggaran.
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Kaur Mintu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Banum dan Bamin dengan tugas sebagai berikut:

1. Banum (Badan Urusan Umum)
 - a. Membantu mengagendakan surat baik masuk maupun keluar.
 - b. Membersihkan ruangan Kasat, Kbo, kanit Patroli dan Staf Min.
 - c. Membantu mengarsipkan surat-surat.
 - d. Membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Sat Sabhara.
 - e. Membantu pimpinan apabila diperlukan.
2. Bamin (Badan Administrasi)
 - a. Menerima surat, mengagendakan, memasukan ke Kasat Sabhara serta membalas surat tersebut (apabila perlu balasan).
 - b. Membuat surat menyurat.
 - c. Mengagendakan surat keluar.

- d. Mengarsipkan surat baik keluar maupun masuk.
 - e. Menata pengarsipan/menyusun arsip-arsip.
 - f. Membuat laporan kegiatan (Lap Bul, Lap Triwulan, Lap Semesteran dan tahunan).
 - g. Mengirim surat keluar.
 - h. Menghimpun Juklak/Juknis.
 - i. Membuat dan mengisi daftar alut, kendaraan, senpi dan anggota Sabhara Polres Teluk Kuantan dan jajaran.
 - j. Membuat Ren Giat (Ren Giat Harian, Mingguan, Bulanan dan Tahunan)
 - k. Membuat absensi anggota.
 - l. Membuat Jadwal Piket.
5. Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Kriminal)
- a. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja bagi pelaksanaan fungsi Sabhara serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas atas arahan Kasat Sabhara dan berkoordinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek.
 - b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi Sabhara Kepolisian, Kaur Bin Ops atas arahan Kasat Sabhara dapat berkoordinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek.
 - c. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.

- d. Menyelenggarakan Administrasi operasional, atas arahan Kasat Sabhara dapat berkoordinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek.
 - e. Mewakili Kasat Sabhara apabila berhalangan melaksanakan tugas kewajiban, dalam batas kewenangannya.
 - f. Dalam pelaksanaan tugasnya Kaur Bin Ops dibantu Kanit Patroli, Panit Patroli, Bamin, para Dan Ton dan Banum.
6. Kanit Pam Obvit (Kepala Unit Pengamanan Objek Vital)
- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan mengatur pelaksanaan/penugasan patroli.
 - b. Menyipakan dan menentukan pembagian sasaran Patroli.
 - c. Menyelenggarakan bantuan, dukungan operasional kepada satuan-satuan yang bertugas di lapangan.
 - d. Menyelenggarakan bantuan/pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan penjagaan, pengawalan dan patroli.
 - e. Melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh Kasat Sabhara maupun atasan lainnya.
 - f. Melaksanakan tugas patroli sesuai jadwal/pembagian sasaran patroli.
 - g. Membuat laporan hasil pelaksanaan patroli.
 - h. Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Patroli di bantu oleh Anggota Patroli, Bamin dan Banum
 - i. Mengatur pelaksanaan tugas patroli serta rute yang harus di lalui oleh petugas patroli baik roda dua maupun roda empat sesuai ren giat serta tingkat kerawanan wilayah.

- j. Mengecek pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh anggotanya melalui buku patroli.
 - k. Mengecek kelengkapan baik kendaraan yang digunakan maupun administrasi dan senjata yang akan di pakai untuk pelaksanaan patroli.
 - l. Memimpin anggota patroli setiap pergerakan baik dalam pelaksanaan patroli, pengamanan dan lainnya.
 - m. Mengabsen anggotanya dalam setiap melaksanakan tugas.
7. Kanit Turjawali (Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli).
- a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Turjawali
 - b. Membuat jadwal pelaksana Turjawali dan mengawasi pelaksanaannya
 - c. Melaksanakan Turjawali
 - d. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penjagaan dan pengaturan anggota Turjawali
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan Turjawali sebagai bahan Pu
 - f. lahjianta
8. Kanit Dalmas (Kepala Unit Pengendali Masa)
- a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Dalmas dalam pelaksanaan tugas pengamanan.
 - b. Melaksanakan pengamanan sesuai surat perintah.
 - c. Melaksanakan pelatihan Dalmas.

4.2. Hasil Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil analisis data untuk mengemukakan tentang temuan atau hasil penelitian yaitu “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus: Samapta Polres Kuantan Singingi). Untuk menjawab permasalahan dan untuk mencapai tujuan, maka semua data tersebut diolah dengan menggunakan uji yang sudah peneliti paparkan di bab sebelumnya.

4.2.1. Analisis Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2018:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*). Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk (Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan.

Rasio efektivitas pada laporan realisasi anggaran Samapta Polres Kuantan Singingi menunjukkan kemampuan instansi dalam mengelola anggaran sesuai dengan yang telah ditargetkan. Mengukur tingkat output

instansi dari organisasi sektor publik terhadap target pendapatan sektor publik.

Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi anggaran.

Rumus efektifitas menurut Mahsun (2013:187-188) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{770.512.000}{770.512.000} \times 100\% = 100\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{785.048.000}{785.048.000} \times 100\% = 100\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{781.708.000}{781.708.000} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Tabel. 4.2
Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Samapta
Polres Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efektivitas (%)	Keterangan	Keterangan/ Penurunan (%)
2020	770.512.000	770.512.000	100	Efektif Berimbang	0
2021	785.048.000	785.048.000	100	Efektif Berimbang	0
2022	781.708.000	781.708.000	100	Efektif Berimbang	0

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas 100%, pada tahun 2021 Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi memiliki tingkat efektivitas sebesar 100% dan pada tahun 2022 Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi memiliki tingkat efektivitas sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi efektif berimbang, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran.

4.2.2. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi Sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Yulianti, 2015). Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk

rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, unit kerja A lebih efisien dibandingkan unit kerja.

Rumus efisiensi menurut Mahsun (2013:187) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{770.512.000}{770.512.000} \times 100\% = 100\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{785.048.000}{785.048.000} \times 100\% = 100\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{781.708.000}{781.708.000} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Tabel 4.3
Perkembangan Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Satuan Samapta
Polres Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efisiensi (%)	Keterangan	Keterangan/ Penurunan (%)
2020	770.512.000	770.512.000	100	Efisien Berimbang	0
2021	785.048.000	785.048.000	100	Efisien Berimbang	0
2022	781.708.000	781.708.000	100	Efisien Berimbang	0

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi pada tahun 2020 memiliki tingkat efisiensi sebesar 100%, pada tahun 2021 Satuan Smapta Polres Kuantan Singingi memiliki tingkat efisiensi sebesar 100% dan pada tahun 2022 Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi memiliki tingkat efisiensi sebesar 100%. Sehingga didapatkan hasil kinerja Satuan Polres Kuantan selama 3 tahun terakhir efisiensi berimbang.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi) memberikan keuntungan yang baik bagi kinerja anggaran Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi, dimana anggaran belanja dan realisasi anggaran Satuan Polres Kuantan Singingi memperlihatkan hasil yang maksimal dilihat dari hasil uji efektivitas dan efesiensi kinerja Satuan Polres Kuantan Singingi.

Tabel 4.4
Data Persentase Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisisnsi Kinerja Satuan Polres Kuantan Singingi

Tahun	Efektivitas (%)	Ket	Kenaikan/ Penurunan (%)	Efisiensi (%)	Ket	Kenaikan/ Penurunan (%)
2020	100	Efektif Berimbang	0	100	Efisien Berimbang	0
2021	100	Efektif Berimbang	0	100	Efisien Berimbang	0
2022	100	Efektif Berimbang	0	100	Efisien Berimbang	0

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Hasil analisis yang dilakukan bahwa efektivitas dan efisiensi menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan suatu kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas dan efisiensi merupakan refleksi *output* dan *input*. Efektivitas dan efisiensi adalah terkait dari hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan antara *output* dengan tujuan. Adapun faktor penentuan efektif dan efisien :(1) faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana, (2) faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan jabatan baik struktur maupun fungsional, (3) faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, (4) dukunga kepala aparaturn dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.

Dalam penelitian ini dengan rumusan masalah, bagaimanakah realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Polrse Kuantan Singingi (studi kasus: Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi), hasil yang di peroleh pada persentase tabel 4.4 pada umumnya realisasi anggaran untuk menilai efektivitas kinerja pada tahun 2020 mendapatkan hasil efektif berimbang, pada tahun 2021 mendapatkan hasil efektif berimbang dan pada tahun 2022 juga mendapatkan hasil efektif berimbang, yaitu dengan hasil anggaran terserap secara keseluruhan dengan tingkat ektivitas sebesar 100%.

Selanjutnya pada persentase tabel 4.4 realisasi anggaran untuk menilai efisiensi kinerja pada tahun 2020 mendapatakan hasil efisien berimbang, pada tahun 2021 mendapatkan hasil efisien berimbang dan pada tahun 2022 juga mendapatakan hasil efisien berimbang, yaitu dengan hasil anggaran terserap secara keseluruhan dengan tingkat efisiensi sebesar 100%.

Selain pengambilan data laporan anggaran dari tahun 2020-2022 yang menjadi acuan, peneliti juga melakukan wawancara beberapa aparatur instansi Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi, bahwasanya anggaran kinerja Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi sangat baik dikarenakan pimpinan instansi dan orang-orang yang di dalam yang menjalankan sistem anggaran instansi adalah orang-orang yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Betul, di katakan pada peneliti terdahulu tentang realisasi anggaran berpengaruh dengan Efektivitas dan efisiensi suatu daerah yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja instansi yaitu faktor personal atau individu, faktor kepemimpinan, faktor Tim, faktor sistem, faktor kontekstual, belanja modal, dana perimbangan dan anggaran yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, sehingga mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan tingkat efektivitas kinerja dalam pengelolaan anggaran Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi selama anggaran tahun 2020 efektif berimbang dengan tingkat efektif sebesar 100%, pada tahun 2021 efektif berimbang dengan tingkat efektif sebesar 100% dan pada tahun 2022 efektif berimbang dengan tingkat efektif 100% dikatakan maksimal dan telah mencapai target karena terserap secara keseluruhan.
2. Perkembangan tingkat efisiensi kinerja pengelolaan anggaran Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi selama anggaran tahun 2020 efisien berimbang dengan tingkat efisiensi sebesar 100%, pada tahun 2021 efisien berimbang dengan tingkat efisiensi sebesar 100% dan pada tahun 2022 efisien berimbang dengan tingkat efisiensi sebesar 100% dikatakan maksimal dan telah mencapai target karena terserap secara keseluruhan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang sudah dipaparkan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran tetap dilakukan sesuai dengan alur dan tata

cara yang ada, namun sebaiknya dimohonkan kepada Bapak Kapolres Kuantan Singingi tidak melakukan mutasi jabatan sebelum masa anggaran selesai.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan indikator efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran kinerja dapat menambahkan indikator lainya seperti konsep *value for money*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alwi, Hasan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Bastian, Indra. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga

Halim, Abdul. dan Kusufi, Syam. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.

Harnanto. 2019. *Dasar-dasar Akuntansi*. Edisi cetakan. 1. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN.

Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukur Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFPE.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.

Serdamayanti. 2014. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.

Rivai & Sagala. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Edisi.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Robbins, Stephen P. Mary Coulter. 2016. *Manajemen*. Edisi 13. Jakarta: Erlangga.

Silaen, Sofar. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi revisi. Bogor: In Media.

Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Skripsi :

Adryanto, Verrys. 2019. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Kota Kediri (Studi pada BPPKAD Kota Kediri Tahun 2014-2017)*. Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Heldawati. 2021. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Khotimah, Ade. Khusnul. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014- 2017*. Skripsi. Universitas Putra Bangsa Kebumen.

Kiky, Muryanti. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal :

Basri, Ramlah. 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA: Vol.1 No. 4, pp 202-212.

Julita. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Index Kumpulan Dosen: Vol,10 No 02.

Lamboan, Syurtika dan Venje. 2014. *Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBE. ISSN 2023-1174. Vol 2, No. 3, Hal 952-961

Makka, Harry. Al. 2015. *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, (221-333).

Shofwah, Alful Laila Rosyidah Noor. Dan Nur, Handayani. 2019. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi (JIRA). 8.7.

Sumange. Ariel. 2013. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaa Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. Vol 1, No 3.

Tamasoleng, Adelsting. 2015. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 3. No. 1. 97-110.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Website :

<https://djk.kemenkeu.go.id>

DRAF WAWANCARA
PADA SATUAN SAMAPTA POLRES KUANTAN SINGINGI
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2020 s/d 2022

Identitas Informan I

Nama : Hajjarul Aswadiman
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tanggal Lahir : Purwajaya, 11 November 1972
 Umur : 51 Tahun
 Pendidikan Terakhir Umum : Sekolah Menengah Akhir
 Pendidikan Terakhir Kepolisian : SIP Angkatan 41
 Alamat : Asrama Polisi Sei. Jering
 Jabatan : Kepala Satuan Samapta

Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
 Waktu : 11.00 WIB
 Tempat : Kantin Polres Kuantan Singingi
 Tujuan : Isi Riset Penelitian Skripsi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kerangka pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pada Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi?	Sistem akuntansi keuangan dimulai dari menginput/mengentri data atau dokumen sumber pada setiap satuan kerja baik berupa DIPA, revisi DIPA (Dokumen Pelksanaan Anggaran), SPPD (Syarat Perintah Untuk Melaksanakan Dinas) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), dll. Setelah dokumen sumber itu di input, kemudian diproses melalui posting (dokumen sumber dikelompokkan ke

		dalam masing-masing kelompok/kegiatan) sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang akurat dan akuntabilitas.
2.	Apa yang Anda ketahui tentang LRA Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi?	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
3.	Apakah yang menjadi tujuan LRA bagi Satuan Sampata Polres Kuantan Singingi?	Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
4.	Siapa sajakah yang turut terlibat dalam penyusunan LRA pada Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi?	AKP HAJJARUL ASWADIMAN BRIPKA WELLY ELIDINA EKASARI,ST. BRIPTU ADE PANALOSA
5.	Apakah terdapat aturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan dan akuntabilitas keuangan yang diterapkan pada Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi?	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam

		Undang-Undang Dasar.
6.	Apa saja yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam penyusunan LRA Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi?	Dasar hukum penyusunan LRA pada satuan Samapta Polres Kuantan Singingi yakni DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Polres Kuantan Singingi.
7	Menurut bapak kinerja yang efektif dan efisien itu seperti apa?	Kinerja yang efektif dan efisien yang baik itu apabila anggaran terserap secara keseluruhan sehingga target yang telah ditetapkan mencapai tujuan.

DRAF WAWANCARA
PADA SATUAN SAMAPTA POLRES KUANTAN SINGINGI
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2020 s/d 2022

Identitas Informan II

Nama : Welly Eldina Ekasari, ST.
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir : Teluk Kuantan, 23 Desember 1986
 Umur : 36 Tahun
 Pendidikan Terakhir Umum : Starata I
 Pendidikan Terakhir Kepolisian : Sepolwan 2006 Gelombang I
 Alamat : Desa Sawah
 Jabatan : Kepala Urusan Administrasi Satuan
 Sampta

Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
 Waktu : 12.30 WIB
 Tempat : Kantin Polres Kuantan Singingi
 Tujuan : Isi Riset Penelitian Skripsi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda ketahui tentang LRA Satuan Samapta Polres Kuantan Singingi	LRA adalah Laporan realisasi anggaran yang dimuat di suatu aplikasi yang dihimpun di Bagren
2.	Apa itu Satuan Samapta?	Yaitu unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf Polres yang berada dibawah naungan Kapolres.
3.	Apa tugas dan wewenang Satuan Samapta?	Pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, tipiring, TP TKP, Dalmas, Negosiator, SAR terbatas.

4.	Mengapa terjadi pergantian nama dari Sabhara menjadi Samapta?	Dalam arahan Kapolda sampaikan, peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang SOTK Polda yang selama ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di tingkat Polda sudah tidak berlaku lagi, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK, sehingga satuan kerja terjadi mengalami perubahan nomenklatur dari Direktorat Sabahara menjadi Direktorat Samapta.
----	---	--

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN WAWANCARA







BIODATA



Identitas Diri

Nama : Renita
Tempat/Tanggal Lahir : Kamang Bakti / 26 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Kamang Bakti, RT 005 RW 002,
Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung,
Sumatra Barat
Telepon Rumah dan HP : 082284696980
E-mail : renirenita2602@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : - TK Harapan Bangsa
- SD N 34 Kamang Baru
- SMP N 18 Sijunjung
- SMA N 1 Teluk Kuantan
- S1 Program Studi Akuntansi Universitas Islam
Kuantan Singingi
Pendidikan Nonformal : - Madrasah Diniyah Alawiyah (MDA) Nurul
Muhajirin

Riwayat Prestasi

- Prestasi Akademi : - SD N 34 Kamang Baru meraih peringkat 5 besar kelas I dan II, meraih peringkat 3 kelas III dan meraih 10 besar kelas IV sampai kelas VI
- SMP N 18 Sijunjung meraih peringkat 10 besar dari kelas VII sampai dengan IX
 - SMA N 1 Teluk Kuantan Meraih peringkat 10 besar dari kelas X sampai dengan XII
- Prestasi Nonakademik : - Mendapatkan Sertifikat Pengibar Bendera Tingkat Kecamatan Kamang Baru
- Juara 3 Lomba PBB
 - Mendapat Sertifikat KKR (Kader Kesehatan Remaja)
 - Mendapat Sertifikat Uji Kompetensi DJP (Direktorat Jendral Pajak)
- Pengalaman Organisasi : - Mengikuti OSIS tingkat SMP
- Mengikuti Organisasi Pramuka
 - Mengikuti Organisasi Paskibraka
- Pengalaman Kerja : -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 21 Juni 2023

Renita
NPM : 190412017